

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cetakan Pertama. Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2010. *Lembaga Penijauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartama. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Cetakan Pertama. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan Ketiga. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sutiyoso. 2009. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Cetakan Ketiga. UII Press, Yogyakarta.
- Cst. Kansil *et all*. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Cetakan Pertama. Kencana Media Group, Jakarta.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Cetakan Pertama. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- E. Fernando M. Manullang. 2017. *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Cetakan Kedua. Kencana, Jakarta.
- Hadari Djenawi Tahir. 1982. *Bab Tentang Herziening Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Cetakan Pertama. Alumni, Bandung.
- Harun M. Husein. 1994. *Surat Dakwaan dalam Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Cetakan Kedua. Rineka Cipta, Jakarta.
- Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Cetakan Pertama. LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

- Jazim Hamidi. 2005. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Cetakan Pertama. UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Cetakan Pertama. Jala Permata Aksara, Jakarta.
- L.J. van Apeldoorn. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Cetakan Keduapuluh. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2010. *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Cetakan Ketiga. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cetakan Kedelapan. Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Cetakan Kedelapan. Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Teori Dan Teknik: Membuat Surat Dakwaan*, Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktik*. Cetakan Pertama. Mandar Maju, Bandung.
- Monang Siahaan. 2017. *Falsafah Dan Filosofis Hukum Acara Pidana*. Cetakan Pertama. Grasindo, Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Oemar Seno Adji. 1981. *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Cetakan Pertama. Erlangga, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cetakan Keempat. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Kencana, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Cetakan Kedua. Putra A. Bardin, Jakarta.
- Saifullah. 2010. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Cetakan Kedua. Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedirjo. 1986. *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana: Arti dan Makna*. Cetakan Pertama. Melton Putra, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Pertama. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1994. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Cetakan Pertama. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cetakan Keempat. Liberty, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Nusa Media, Bandung.
- Trimoelja D. Soerjadi. 2004. *Kendala Menegakkan Kebenaran dan Keadilan*. Cetakan Pertama. Guna Widya. Surabaya.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Cetakan Pertama. Widya Padjadjaran, Bandung.

Kamus

- Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Cst. Kansil *et all.* 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Cetakan Pertama. Kencana Media Group, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Pertama Edisi IV. Gramedia, Jakarta.

Internet

www.hukumonline.com.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1976.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1969.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XXI/2023.